

STRATEGI PENANGULANGAN KEMISKINAN DAN KETAHANAN PANGAN MELALUI KEBIJAKAN BERAS DAERAH (RASDA) DAN BERAS PNS PADA PROGRAM BELA BELI KULONPROGO

Muhammad Lukman Hakim¹, Revorlin Telaumbanua²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945, Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Jakarta, Indonesia

Email: muhammad.hakim@uta45jakarta.ac.id

Article History

Received: 20-08-2023

Revision: 24-08-2023

Accepted: 26-08-2023

Published: 29-08-2023

Abstract. This research discusses strategies for poverty alleviation and food security through the regional rice program and civil servant rice which are derivative programs from the Bela Beli Kulon Progo program. The research method used is descriptive qualitative. the type of data used is secondary data. The results of this study, the regional rice program (RASDA) and civil servant rice can improve the welfare of food producing farmers and at the same time realize Law no. 18 of 2012 concerning Food Security which mandates to achieve affordability of food by implementing policies in the food sector. The Rasda program was implemented concurrently with rice for civil servants. This program aims to spur economic growth and improve the welfare of Kulonprogo farmers. As the main executor of the Regional Rice Program (Rasda) and Civil Servant Rice is the Association of Farmers Groups (Gapoktan) consisting of Panca Manunggal, Ngestiharjo, Makmur Sejahtera, Among Farmers, Sidomaju, Sari Mulyo, Sumber Makmur. The conclusion from this study is that regional rice and civil servant rice can support food security and contribute to poverty alleviation.

Keywords: Poverty, Food Security, Regional Rice, Civil Servant Rice

Abstrak. Penelitian ini membahas strategi penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan melalui program beras daerah dan beras pns yang menjadi program turunan dari bela beli kulon progo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini, adanya Program beras daerah (RASDA) dan Beras PNS dapat meningkatkan kesejahteraan para petani produsen pangan dan sekaligus mewujudkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan yang mengamanatkan untuk mewujudkan keterjangkauan pangan dengan melaksanakan kebijakan di bidang pangan. Program Rasda ini dilaksanakan secara bersamaan dengan beras PNS. Program ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani Kulonprogo. Sebagai pelaksana utama Program Beras Daerah (Rasda) dan Beras PNS adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdiri dari Panca Manunggal, Ngestiharjo, Makmur Sejahtera, Among Tani, Sidomaju, Sari Mulyo, Sumber Makmur. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa adanya beras daerah dan beras PNS dapat menunjang ketahanan pangan dan berkontribusi terhadap pengetasan kemiskinan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Beras Daerah, Beras PNS

How to Cite: Hakim, M. L & Telaumbanua, R. (2023). Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Melalui Kebijakan Beras Daerah (RASDA) dan Beras PNS pada Program Bela Beli Kulonprogo. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3 (2), 339-345. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.267>.

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap negara tidak bisa dipisahkan dari partisipasi dan pemberdayaan masyarakatnya. Pembangunan selalu tidak lepas dari persoalan kemiskinan (Nindatu, 2019) Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi hampir oleh setiap bangsa di dunia. Secara umum definisi kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. (Pratama, 2015) Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. (Vania Grace Sianturi et al., 2021) Kemiskinan adalah masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, politik dan budaya. Keterkaitan antara kebijakan ekonomi makro dengan kebijakan sosial, politik dan budaya menjadi kunci utama dalam menyusun kebijakan anti kemiskinan (Hermanto, 2017) Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka pembangunan tidak bisa dilepaskan dari penanggulangan kemiskinan (Muhammad Lukman Hakim1, 2020). Maka di dalam pembangunan selalu dibutuhkan pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan (Affandi et al., 2009). Partisipasi aktif masyarakat menjadi hal yang tidak bisa diabaikan dan menjadi salah satu penentu pengurangan kemiskinan. Tetapi dalam kenyataannya partisipasi masyarakat dalam ekonomi produktif masih rendah dikarenakan kurangnya pendidikan dan ketrampilan masyarakat. Dengan kondisi yang demikian ini, maka masyarakat akan semakin terjebak di dalam lingkaran kemiskinan / poverty trap. (Muhammad Lukman Hakim1, 2020)

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program nasional dalam kurun waktu dan pemerintahan yang berbeda-beda, antara lain: Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Miskin (Raskin) / Beras Sejahtera (Rastra) yang diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan lain-lain. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan cukup berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan pada saat itu, tetapi mengapa persoalan kemiskinan seakan tidak pernah selesai. Upaya pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat tersebut akan lebih maksimal, apabila dipadukan dengan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan inovasi-inovasinya. Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak selalu efektif dalam menanggulangi kemiskinan di daerah, karena tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam kondisi perekonomian daerah, potensi daerah, tata kelola pemerintahan serta budaya masyarakatnya dalam menghadapi kemiskinan. Terkait dengan hal tersebut, inovasi program

penanggulangan kemiskinan yang di prakarsai oleh pemerintah daerah perlu mendapat dukungan, karena daerah lebih paham terhadap potensinya, kondisi kemiskinan dan cara penanggulangannya. Hal yang diharapkan, dari kolaborasi dan sinergi program pengentasan kemiskinan dari pusat dan daerah, agar dalam program tersebut dapat lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Gerakan Bela-Beli Kulonprogo merupakan sebuah komitmen inovasi kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Kulonprogo dalam pengentasan kemiskinan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 19 tahun 2015 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan disebutkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan : a) kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor policy*) b) melindungi masyarakat agar tidak jatuh miskin (*against poor policy*). Wujud nyata dari komitmen pengentasan kemiskinan ini adalah program Bela-Beli Kulonprogo yang konsep awalnya bertujuan mengupayakan kemandirian ekonomi bagi rakyatnya, dengan menjadikan produk lokal sebagai tuan rumah di daerah sendiri, ditengah dominasi produk impor di era globalisasi dan pasar bebas. Semangat Bela-Beli Kulonprogo merupakan semangat idiologis pembebasan masyarakat Kulonprogo dari kaum kapitalis menuju tatanan perekonomian rakyat yang memiliki bobot kemandirian. Gerakan Bela-Beli Kulonprogo meliputi beberapa program: Beras Daerah (RASDA), Beras PNS, Air-Ku, Batik khas Kulonprogo (batik Gebleg Renteng), TOMIRA (Toko Milik Rakyat) dan Bedah Menoreh. Gerakan Bela-Beli Kulonprogo juga merupakan “Regional Branding “yang memberikan ciri khas suatu daerah sehingga akan lebih diingat dan dikenal oleh masyarakat luas, terbukti program Bela-Beli Kulonprogo ini dicontoh oleh kabupaten lain di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk dapat menjelaskan hasil analisis melalui bentuk narasi. Studi ini mengambil objek penelitian di Kulon Progo, DIY dan dikususkan menyiorot Beras daerah dan PNS untuk melihat kontribusinya terhadap penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan di Kulonprogo. Data diambil dari dokumen resmi pemerintahan. Penelitian terdahulu, Portal berita dan koran serta media social.

HASIL

Kabupaten Kulonprogo merupakan salah satu kabupaten di propinsi DIY yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi (Mustofa, 2018). Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo pada tahun 2011 angka kemiskinan di

Kulonprogo adalah 23,62 % (angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata DIY 16,8 % dan angka kemiskinan nasional 12,49 %). Pada tahun 2012 angka kemiskinan Kulonprogo menurun menjadi 23,22 % (tetapi masih lebih tinggi dibanding rata-rata DIY 15,88% dan angka kemiskinan nasional 11,66 %). Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan, pada tanggal 23 Maret 2013 di deklarasikan program-program Bela-Beli Kulonprogo oleh Bupati dr Hasto Wardoyo SPOG yang meliputi 4 program pokok yaitu Modifikasi Program Pemerintah meliputi Beras Daerah (Rasda) pengganti Raskin (Beras Miskin), BPTN (Bantuan Pangan Non Tunai), Intervensi Pasar (Airku, batik Geblek Renteng), Kolaborasi Ekonomi Rakyat (Tomira/Toko Milik Rakyat), Infrastruktur Membelah Lokus Kemiskinan (Bedah Menoreh). Gerakan ini merupakan wujud keberpihakan dan pembelaan pemerintah kabupaten Kulonprogo kepada seluruh komponen seperti petani, UMKM, Koperasi, BUMD dan seluruh masyarakat. Tag line yang diusung “*Madhep Mantep Mangan Pangane Dhewe, Madhep Mantep Ngombe Banyune Dhewe, Nganggo Klambine Dhewe*”.

Salah satu hasil positif dari program tersebut, data BPS tahun 2014-2015, jumlah total penduduk miskin tahun 2015 di Kabupaten Kulonprogo mengalami penurunan dari tahun 2014 sejumlah 1.83 % (BPS 2015). Pada setiap tahunnya dari 2011-2015 angka kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo menurun dengan stabil, yang menunjukkan *salah satu* hasil dari upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Bela-Beli Kulonprogo, walaupun penurunan angka kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja.

Program beras daerah (RASDA) dan Beras PNS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani produsen pangan dan merupakan perwujudan dari UU No. 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan yang mengamanatkan untuk mewujudkan keterjangkauan pangan dengan melaksanakan kebijakan di bidang pangan. Program Rasda ini dilaksanakan secara bersamaan dengan beras PNS berdasarkan SE Bupati Kulonprogo No.500/5231 tahun 2015 tentang program beras PNS. Program ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani Kulonprogo. Sebagai pelaksana utama Program Beras Daerah (Rasda) dan Beras PNS adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdiri dari Panca Manunggal, Ngestiharjo, Makmur Sejahtera, Among Tani, Sidomaju, Sari Mulyo, Sumber Makmur dan

Guyub Rukun. Gapoktan tersebut mendapat fasilitasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo berupa peralatan yang digunakan untuk produksi beras dari alat pengolahan sampai pasca panen seperti traktor, dryer, komben dan mesin penggiling beras serta bantuan modal Rp. 375.000.000,00 untuk pelaksanaan produksi beras. Skema kerja pelaksanaan

program Beras Daerah adalah Gapoktan menyalurkan hasil panen yang sudah berupa beras kepada Bulog. Kemudian Bulog menyalurkan kepada Rumah Tangga Miskin. Dalam pelaksanaan program Beras PNS, Gapoktan juga berkoordinasi langsung dengan SKPD Kabupaten Kulonprogo untuk pembelian beras PNS. Gapoktan melaporkan pembelian kembali kepada SKPD, SKPD melaporkan kepada Kabag Perekonomian Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

Kalau kita perhatikan lebih lanjut, manfaat lain dari program Beras Daerah dan Beras PNS adalah sisi ketahanan pangan karena program tersebut merupakan usaha yang serius untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Kulonprogo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini ditegaskan lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 38 Tahun 2007 bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang dominan di Kabupaten Kulonprogo karena sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 22,87 % pada tahun 2013. Implementasi dua program tersebut yaitu program Bela-Beli Kulonprogo dan program Ketahanan Pangan, dapat berkontribusi mengurangi angka kemiskinan yang tinggi menjadi lebih rendah, yaitu dari semula 34 desa rawan pangan menjadi 9 desa. Implementasi kebijakan pro pangan ini juga dapat dilihat dari Gapoktan mensukseskan upaya distribusi beras petani kepada penerima program Beras Daerah (Rasda) dan Beras PNS. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menginstruksikan PNS untuk mengkonsumsi beras petani 10 kg per bulan yang disediakan oleh Gapoktan, sehingga Gapoktan sudah mempunyai pasar tetap untuk produksinya. Dengan adanya pasar tetap, maka banyaknya uang yang beredar di Kabupaten Kulon Progo akan menguntungkan petani dan masyarakat, sehingga mereka merasa aman secara ekonomi, karena produk pertanian mereka mempunyai pangsa pasar yang jelas, serta ada harga yang kompetitif yang diterima petani.

Meskipun program-program kebijakan Bela-Beli Kulonprogo ini merupakan program yang sudah diakui oleh negara dan mendapat beberapa penghargaan, serta sudah diadopsi melalui studi banding oleh berbagai daerah di Indonesia, tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala. Pada program batik daerah Gebleg Renteng ditemukan kendala sistem managerial yang pengelolaannya sangat sederhana, belum ada pengembangan aktifitas produksi untuk meningkatkan produktifitas dan keuntungan. Kendala program Air-Ku adalah tahapan produksi yang masih relatif sulit, produksi yang

belum sesuai target, kemasan Air-Ku masih didatangkan dari luar Kulonprogo serta sumber daya manusia yang sedikit dan upah yang masih rendah. Pada program TOMIRA terkendala koperasi mitra yang ditunjuk belum mampu mengelola sendiri, sehingga mereka masih sangat tergantung kepada manajemen Alfamart dan Indomaret. Begitu pula dengan program Beras Daerah (RASDA) dan Beras PNS, masih terkendala dengan pemenuhan kebutuhan beras untuk Raskin/Rastra di Kulonprogo, yang belum dapat dipenuhi secara keseluruhan dari beras produksi Gapoktan di Kulonprogo sendiri. Pada tahun 2014, Gapoktan di Kulonprogo sepakat untuk memasok 3.600-ton dari total kebutuhan 7.700-ton lebih, tetapi ternyata Gapoktan baru bisa memenuhi beras 4.000 ton/bulan sedangkan kebutuhan Bulog sebanyak 6.000 ton/bulan sehingga belum semua rumah tangga miskin di Kulonprogo mendapat distribusi RASDA. Disamping itu terdapat keluhan dari masyarakat tentang kualitas beras yang kurang baik dan indikasi bahwa tidak semua beras yang dihasilkan oleh Gapoktan berasal dari daerah Kulonprogo, tetapi sebagian disediakan oleh pedagang dari luar Kulonprogo.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut, program-program Bela-Beli Kulonprogo pada kenyataannya *belum bisa mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh*, meskipun tetap berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan sebagaimana di sampaikan di atas. Mengingat program tersebut baru digulirkan pada tahun 2013, di sadari bahwa untuk pengentasan kemiskinan secara menyeluruh diperlukan waktu yang cukup lama, komitmen untuk melaksanakan bahkan mengembangkan. Disamping hal tersebut, ternyata partisipasi masyarakat dalam gerakan Bela-Beli Kulonprogo belum optimal, sehingga dampaknya pun belum merata dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa program Bela-Beli Kulonprogo merupakan contoh inovasi program pemerintah daerah dalam usaha pengentasan kemiskinan yang akan melengkapi program-program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Pusat, yang selayaknya dikembangkan di daerah dengan tetap menyesuaikan potensi daerah, kultur masyarakat dan sistem tata kelola pemerintahan daerah. Adanya beras daerah dan beras PNS dapat menunjang ketahanan pangan dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu program pengembangan UMKM di daerah menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

REFERENSI

- Affandi, Sumartono, & Wahab, S. A. (2009). Pembangunan Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan. *Wacana*, 10(1), 37–53
- Hermanto. (2017). Poverty Reduction in Rural Areas : Human Resouce Development , Business Strengthening and Agricultural Innovation. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 35(2), 139–150.
- Muhammad Lukman Hakim1, A. F. R. (2020). Strategi Penggulangan Kemiskinan Berbasis Pluralisme Kesejahteraan : Studi Kasus Program JCOMMENT (Journal of Community Empowerment). *JCOMMENT (Journal of Community Empowerment)*, 1(1), 1–11. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/jce/index>
- Mustofa, M. (2018). Kemiskinan Multidimensi Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 15(1), 27–34. <https://doi.org/10.21831/jep.v15i1.19706>
- Nindatu, P. I. (2019). Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan kemiskinan. *Jurnal Persektif Komunikatif*, 3(2), 91–103.
- Pratama, Y. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Esensi*, 4(2), 45–53. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Vania Grace Sianturi, M. Syafii, & Ahmad Albar Tanjung. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125–133. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>